



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 063.01.1.445161/2025**



DS:3904-2724-0712-2330

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
- Sebesar : Rp. 51.916.739.000 (LIMA PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM BELAS JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	38.754.480.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	13.162.259.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 51.916.739.000

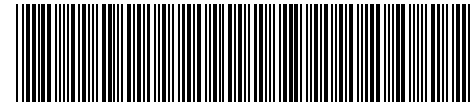
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025



DS:3904-2724-0712-2330

Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	51.916.739.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	5.263.879.000
DR.4119	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Rp.	9.810.472.000
DR.4121	Pengawasan Kosmetik	Rp.	8.054.681.000
DR.4128	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Rp.	15.661.332.000
DR.4129	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Rp.	4.900.007.000
DR.6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Rp.	8.226.368.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : I A. 1

Program	: 063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	51.916.739.000
Kegiatan	: 3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5.263.879.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 2. 01	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	
	: 3. 01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 4. 01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	
	: 5. 01	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	: 6. 01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 7. 02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 8. 02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 9. 02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	
	: 10. 02	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	
	: 11. 02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	: 12. 03	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	
	: 13. 03	Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 14. 03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 15. 03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 16. 04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 17. 04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 18. 04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 19. 05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	
	: 20. 05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing -masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 21. 06	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : I A. 3

Fasilitasi dan Pembinaan Industri

Industri, IKM, Miliar USD

Klasifikasi Rincian Output	5	:	4119.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.743,00	Produk, Laporan, Keputusan	3.500.472.000
Rincian Output		:	01 BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	1743,00	Keputusan	3.500.472.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4119.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	362,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.400.000.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	12,00	Laporan	900.000.000
		:	02 BIC.002	keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	350,00	Keputusan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4119.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	160,00	UMKM	1.660.000.000
Rincian Output		:	01 QDG.001	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	7,00	UMKM	800.000.000
		:	02 QDG.002	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	4,00	UMKM	200.000.000
		:	03 QDG.003	Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	149,00	UMKM	660.000.000
Kegiatan		:	4121	Pengawasan Kosmetik			8.054.681.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan			
		:	2. 02	Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	8	:	4121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	11.114,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1.910.824.000
Rincian Output		:	01	BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	11114.00	dokumen	1.910.824.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	4121.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.166,00	Produk, Laporan, Keputusan	3.252.193.000
Rincian Output		:	01	BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	1166.00	Keputusan	3.252.193.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4121.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	115,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.041.664.000
Rincian Output		:	01	BIC.001 Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor	100.00	Keputusan	402.584.000
Rincian Output		:	02	BIC.002 Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	15.00	Laporan	639.080.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4121.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	110,00	Industri, IKM, Miliar USD	1.850.000.000
Rincian Output		:	01	QDI.001 Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	35.00	Industri	1.100.000.000
Rincian Output		:	02	QDI.002 BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	75.00	Industri	750.000.000
Kegiatan		:	4128	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			15.661.332.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik			
		:	2. 01	Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar			
		:	3. 01	Persentase obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan			
		:	4. 01	Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : I A. 5

Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- 5. 02 Persentase obat bahan alam dan suplemen kesehatan untuk penanganan PTM yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan
- 6. 02 Persentase peningkatan penelitian uji pra klinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar
- 7. 03 Persentase peningkatan jumlah varian produk Jamu yang terdaftar
- 8. 04 Persentase keputusan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
- 9. 05 Persentase keputusan penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan sesuai ketentuan

Klasifikasi Rincian Output	12	:	4128.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	6,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	3.317.971.000
Rincian Output		:	01 BAH.001	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	6.00	layanan	3.317.971.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	4128.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.200,00	Produk, Laporan, Keputusan	1.486.813.000
Rincian Output		:	01 BIA.001	Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	1200.00	Keputusan	1.486.813.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	4128.PCA	Perizinan Produk	81.000,00	Produk, Keputusan	5.177.717.000
Rincian Output		:	01 PCA.001	Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan (PN)	81000.00	Keputusan	5.177.717.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4128.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.340,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	5.678.831.000
Rincian Output		:	01 QDB.001	Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik (PN)	3340.00	Lembaga	5.678.831.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



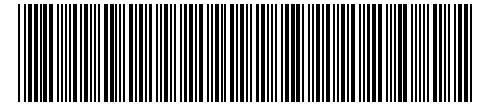
DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : I A. 6

Kegiatan	:	4129	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			4.900.007.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik					
Klasifikasi Rincian Output	16	:	4129.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	104,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	531.241.000	
Rincian Output	:	01	ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	104,00	Rekomendasi Kebijakan	531.241.000	
Klasifikasi Rincian Output	17	:	4129.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	18,00	Paket, Unit	170.000.000	
Rincian Output	:	01	CAB.001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	18,00	Unit	170.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	18	:	4129.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	45,00	Unit	600.000.000	
Rincian Output	:	01	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	45,00	Unit	600.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	19	:	4129.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.598.766.000	
Rincian Output	:	01	PFA.001	Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (PN) yang Disusun	7,00	Standar	3.098.766.000	
			02	PFA.002	Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting (PN)	1,00	Standar	500.000.000
Kegiatan	:	6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos			8.226.368.000		
	:	1. 01	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik yang sesuai standar					
	:	2. 01	Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik					
	:	3. 01	Tingkat efektivitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik					

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : I A. 7

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos

- 4. 02 Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK
- 5. 02 Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Klasifikasi Rincian Output	20	:	6385.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	500.000.000
Rincian Output		:	01 BAH.001	Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	1,00	layanan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	21	:	6385.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	200,00	Orang	2.421.799.000
Rincian Output		:	01 BDC.001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	200,00	Orang	2.421.799.000
Klasifikasi Rincian Output	22	:	6385.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	115,00	Orang	4.304.569.000
Rincian Output		:	01 QDC.001	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar (PN)	115,00	Orang	4.304.569.000
Klasifikasi Rincian Output	23	:	6385.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 UBA.002	Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha (PN)	10,00	Kab/Kota	1.000.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025

I B. SUMBER DANA



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	51.916.739.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	38.754.480.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	13.162.259.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445161	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	-	50.806.739	1.110.000	-	-	51.916.739		
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	50.806.739	1.110.000	-	-	51.916.739		
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	5.263.879	-	-	-	5.263.879		
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.804.570	-	-	-	2.804.570	01 . 51	
01	RM	-	2.804.570	-	-	-	2.804.570	175@	
3165.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.459.309	-	-	-	2.459.309	01 . 51	
01	RM	-	2.259.309	-	-	-	2.259.309	175@	
04	PNBP	-	200.000	-	-	-	200.000	175@	
4119	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	-	9.810.472	-	-	-	9.810.472		
4119.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



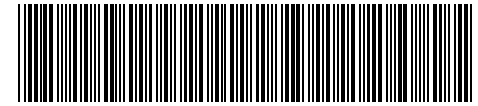
DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	1.313.100	-	-	-	1.313.100	175@	
04 PNB		-	1.186.900	-	-	-	1.186.900	175	
4119.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	750.000	-	-	-	750.000	01 . 51	
01 RM		-	740.600	-	-	-	740.600	175@	
04 PNB		-	9.400	-	-	-	9.400	175	
4119.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.500.472	-	-	-	3.500.472	01 . 51	
01 RM		-	2.326.140	-	-	-	2.326.140	175@	
04 PNB		-	1.174.332	-	-	-	1.174.332	175@	
4119.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	01 . 51	
01 RM		-	805.980	-	-	-	805.980	175@	
04 PNB		-	594.020	-	-	-	594.020	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4119.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.660.000	-	-	-	1.660.000	01 . 51	
01	RM	-	1.660.000	-	-	-	1.660.000	175@	
4121	Pengawasan Kosmetik	-	8.054.681	-	-	-	8.054.681		
4121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.910.824	-	-	-	1.910.824	01 . 51	
01	RM	-	766.231	-	-	-	766.231	175@	
04	PNBP	-	1.144.593	-	-	-	1.144.593	175@	
4121.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.252.193	-	-	-	3.252.193	01 . 51	
01	RM	-	2.259.014	-	-	-	2.259.014	175@	
04	PNBP	-	993.179	-	-	-	993.179	175@	
4121.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.041.664	-	-	-	1.041.664	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



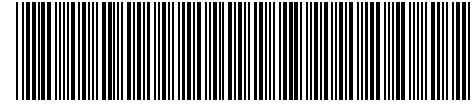
DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	723.664	-	-	-	723.664	175@	
04 PNBP		-	318.000	-	-	-	318.000	175@	
4121.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.850.000	-	-	-	1.850.000	01 . 51	
01 RM		-	1.341.120	-	-	-	1.341.120	175@	
04 PNBP		-	508.880	-	-	-	508.880	175@	
4128	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	15.321.332	340.000	-	-	15.661.332		
4128.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.977.971	340.000	-	-	3.317.971	01 . 51	
01 RM		-	2.738.641	340.000	-	-	3.078.641	175@	
04 PNBP		-	239.330	-	-	-	239.330	175	
4128.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.486.813	-	-	-	1.486.813	01 . 51	
01 RM		-	973.441	-	-	-	973.441	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNBP		-	513.372	-	-	-	513.372	175	
4128.PCA	Perizinan Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.177.717	-	-	-	5.177.717	01 . 51	
01 RM		-	2.070.400	-	-	-	2.070.400	175@	
04 PNBP		-	3.107.317	-	-	-	3.107.317	175@	
4128.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.678.831	-	-	-	5.678.831	01 . 51	
01 RM		-	3.739.358	-	-	-	3.739.358	175@	
04 PNBP		-	1.939.473	-	-	-	1.939.473	175	
4129	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	4.130.007	770.000	-	-	4.900.007		
4129.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	531.241	-	-	-	531.241	01 . 51	
01 RM		-	67.778	-	-	-	67.778	175	
04 PNBP		-	463.463	-	-	-	463.463	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4129.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	170.000	-	-	170.000	01 . 51	
04	PNBP	-	-	170.000	-	-	170.000	175	
4129.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	600.000	-	-	600.000	01 . 51	
04	PNBP	-	-	600.000	-	-	600.000	175	
4129.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.598.766	-	-	-	3.598.766	01 . 51	
01	RM	-	3.598.766	-	-	-	3.598.766	175@	
6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	-	8.226.368	-	-	-	8.226.368		
6385.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 51	
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
Kewenangan : (KP)

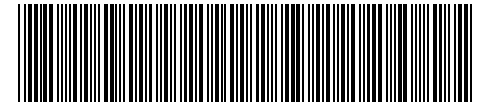
Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6385.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.421.799	-	-	-	2.421.799	01 . 51	
01	RM	-	2.421.799	-	-	-	2.421.799	175@	
6385.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.304.569	-	-	-	4.304.569	01 . 51	
01	RM	-	4.304.569	-	-	-	4.304.569	175@	
6385.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 51	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	175@	
JUMLAH		-	50.806.739	1.110.000	-	-	51.916.739		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	445161	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.740.938	3.613.948	4.994.632	4.219.581	4.406.130	4.588.555	4.544.567	4.816.188	5.203.492	4.220.023	3.971.665	4.597.019	51.916.739
		BELANJA BARANG	2.712.643	3.548.250	4.274.837	4.177.882	4.354.513	4.560.260	4.511.901	4.787.893	5.175.197	4.191.728	3.943.370	4.568.265	50.806.739
		BELANJA MODAL	28.295	65.698	719.795	41.698	51.617	28.295	32.667	28.295	28.295	28.295	28.295	28.754	1.110.000
063.01.DR.3165		Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	366.924	366.924	418.939	366.924	438.939	438.939	438.939	438.939	438.939	406.385	401.184	741.905	5.263.879
063.01.DR.4119		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	366.924	366.924	418.939	366.924	438.939	438.939	438.939	438.939	438.939	406.385	401.184	741.905	5.263.879
063.01.DR.4121		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Pengawasan Kosmetik	585.389	611.984	930.669	585.389	609.124	909.811	886.335	887.622	859.876	853.795	853.795	1.236.684	9.810.472
063.01.DR.4128		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	585.389	611.984	930.669	585.389	609.124	909.811	886.335	887.622	859.876	853.795	853.795	1.236.684	9.810.472
063.01.DR.4129		52 BELANJA BARANG DAN BARANG 53 BELANJA MODAL Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.020	404.765	724.509	804.445	964.317	1.044.254	884.381	804.445	804.445	724.509	484.701	324.889	8.054.681
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	85.020	404.765	724.509	804.445	964.317	1.044.254	884.381	804.445	804.445	724.509	484.701	324.889	8.054.681
		53 BELANJA MODAL	1.059.357	1.063.695	1.064.931	1.110.127	1.145.899	1.158.450	1.474.427	1.449.838	1.865.962	1.473.806	1.247.931	1.546.910	15.661.332
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.031.062	1.035.400	1.036.636	1.081.832	1.117.603	1.130.155	1.446.132	1.421.543	1.837.666	1.445.511	1.219.636	1.518.156	15.321.332
		53 BELANJA MODAL	28.295	28.295	28.295	28.295	28.295	28.295	28.295	28.295	28.295	28.295	28.295	28.754	340.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	86.042	506.354	1.137.499	655.323	590.534	364.893	157.636	384.426	513.960	116.022	304.313	83.006	4.900.007
		53 BELANJA MODAL	86.042	468.950	445.999	641.920	567.212	364.893	153.264	384.426	513.960	116.022	304.313	83.006	4.130.007

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445161) DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		53 BELANJA MODAL	0	37.403	691.500	13.403	23.322	0	4.372	0	0	0	0	0	770.000
	063.01.DR.6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	558.206	660.227	718.085	697.373	657.317	672.210	702.850	850.918	720.310	645.506	679.741	663.625	8.226.368
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	558.206	660.227	718.085	697.373	657.317	672.210	702.850	850.918	720.310	645.506	679.741	663.625	8.226.368
		PERKIRAAN PENERIMAAN	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	117.832.800
		- PNBP (425321)	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	9.819.400	117.832.800

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
IV A. B L O K I R**



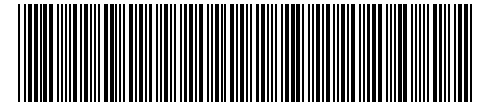
DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445161] DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
445161	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	4119	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 20.245.500	4119.BAH	Pelayanan Publik Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 19.905.500	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
	53 Belanja Modal Rp. 340.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.600
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	521211	Belanja Bahan(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 213.910
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.500		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
3165.BKB	Pemantauan produk		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.850
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.330	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.000
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.750	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.560
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 149.655	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000
			Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
		Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 517.420

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445161] DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4119.BDI	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden	4119.BIA	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Pengawasan dan Pengendalian Produk
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.520		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 544.715
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 280.240		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.950
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Fasilitasi dan Pembinaan Industri		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 122.011
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.000	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 251.684		
Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 206.400	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 177.450		
Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 282.900	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.000		
Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 177.300			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445161] DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4119.BIC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 135.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4119.QDG	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 208.730 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.912 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 295.955 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.235 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.725 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Fasilitas dan Pembinaan UMKM
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 870 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 178.050 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.700 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 148.900 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445161] DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 157.190 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 450.805 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 124.110 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 209.025 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	4121 Pengawasan Kosmetik		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.410 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4121.BAH Pelayanan Publik Lainnya	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 347.250 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.210 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.300 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 256.893 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.475 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 129.700 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 477.620 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 250.689 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4121.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
IV A. B L O K I R**



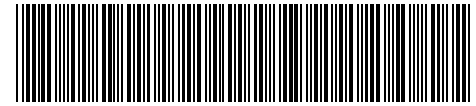
DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445161] DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
4121.BIC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.090 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.700 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 250.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 158.500 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 371.040 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.090 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.040 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.495 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 296.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 149.020 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 115.200 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	4121.QDI		Fasilitas dan Pembinaan Industri 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.650 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 215.390 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445161] DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4128	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.055 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	4128.BAH Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 90.390 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4128.BAH Pelayanan Publik Lainnya	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.331.725 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 424.823 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4128.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 340.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 421.949 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4128.PCA Perizinan Produk	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.630 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 109.855 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 107.804 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 370.107 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 142.280 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445161] DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
4128.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.876.520 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.300 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
4129	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 428.868 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 676.783 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	4129.ABG Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 180.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
4129.PFA	Kebijakan Bidang Kesehatan	6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.900 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		6385.BAH	Pelayanan Publik Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.600 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
4129.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6385.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.540 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.200 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
4129.PFA	521511 Belanja Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 90.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 216.250 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 328.060 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445161] DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

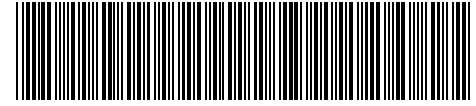
Halaman : IV.A. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6385.QDC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.350 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6385.UBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 148.093 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 91.328 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 314.577 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 246.900 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 520.825 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.520 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 465.972 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 462.397 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.800 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 368.489 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445161/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:3904-2724-0712-2330

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445161] DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503